

## **REKONSTRUKSI KEDUDUKAN AHLI WARIS TERHADAP DANA PERTANGGUNGAN (ASURANSI) KORBAN KECELAKAAN ANGKUTAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

### **Abstrak**

Hubungan hukum pertanggungan wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran dana pertanggungan/penumpang dan pengguna dana penanggung/pemerintah yang dalam perjanjian tersebut adalah mengenai kematian. Mengenai ahli waris korban kecelakaan meninggal angkutan yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 Pasal 1 huruf g disebutkan hanya anak-anak, janda/duda dan atau orang tua korban. Hal ini menimbulkan beberapa persoalan, dimana disatu sisi dana ganti kerugian pertanggungan merupakan dana yang dapat diserahkan kepada orang yang ditunjuk dalam polis (*testamentair*) meskipun bukan ahli waris yang berhak artinya ahli waris tersebut menghijab ahli waris yang lain, dan disisi lain ganti kerugian pertanggungan (dana santunan pertanggungan) merupakan warisan (*tirkah*) yang harus diserahkan dan bagi kepada ahli warisnya sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam (*al-Furud al-Muqaddarah*).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal* yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris/sosial dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggungan (asuransi) korban kecelakaan angkutan saat ini belum memenuhi nilai keadilan. menghimpun dana melalui iuran dan sumbangan wajib. Iuran wajib di himpun melalui penumpang angkutan umum yang disertakan dalam pembayaran ongkos angkutan menjadi satu dengan karcis. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh PT Jasa Raharja (Persero ) adalah hambatan yang bersifat internal artinya hambatan ini tumbuh dan berkembang dari dalam Perusahaan PT Jasa Raharja (Persero) baik yang diakibatkan dari kebijakan Menteri Keuangan selaku atau wakil Pemerintah, hambatan eksternal hambatan ini berkaitan erat dengan hubungan timbal balik dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya adalah Pemerintah Daerah dan Kepolisian. 2) Peraturan kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggungan (asuransi) korban kecelakaan angkutan. Tanggung jawab Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas. 3) Kontruksi ideal kedudukan ahli waris terhadap dana pertanggungan (asuransi) korban kecelakaan angkutan berdasarkan nilai keadilan. korban/ahli waris korban diberikan kesempatan untuk mengurus kepada asuransi yang lain dengan cara persyaratannya di legalisasi atau sebaliknya.

**Kata Kunci:** Rekonstruksi, Kedudukan Ahli Waris, Nilai Keadilan

## **RECONSTRUCTION OF THE POSITION OF THE HERITAGE EXISTING TO THE INSURANCE VICTIMS OF TRANSPORT ACCIDENT VICTIMS BASED ON JUSTICE VALUE**

### **Abstract**

The legal relationship of the compulsory liability of a passenger accident is created between the payer of the insured / passenger fund and the authority of the insurer / government which in the agreement is about death. Regarding the heirs of transportation dead accident victims who in Government Regulation Number 17 of 1965 Article 1 letter g stated only children, widows / widowers and or victims' parents. This raises a number of issues, where on the one hand the insurance compensation fund is a fund that can be handed over to the person appointed in the policy (testamentair) even though it is not the heir who has the right to mean that the heir disguises the other heirs, and on the other hand, compensation coverage (compensation funds) are inheritance (tirkah) which must be submitted and to the heirs according to the provisions of Islamic inheritance law (al-Furud al-Muqaddarah).

The approach method used in this study is socio legal by conducting reciprocal research between law and non-doctrinal institutions that are empirical / social in reviewing the rules of law in society. This research is descriptive analytical meaning that the results of this study try to provide a comprehensive picture, in depth about a situation or the phenomenon under study Data analysis used in this study is qualitative data analysis.

The results of this study are (1) The position of the heirs to the insurance fund (insurance) the victims of transportation accidents currently do not meet the value of justice. raise funds through contributions and mandatory contributions. Contribution must be collected through public transport passengers who are included in the payment of freight charges into one ticket. The obstacles and constraints faced by PT Jasa Raharja (Persero) are internal barriers, meaning that these barriers grow and develop from within the PT Jasa Raharja (Persero) Company both resulting from the policy of the Minister of Finance as or the representative of the Government, external barriers to this barrier are closely related with reciprocal relations with other government agencies, especially the Regional Government and the Police. 2) Regulation of the position of heirs to insurance funds (insurance) victims of transportation accidents. Corporate Responsibility of PT. Jasa Raharja (Persero) has been implemented in accordance with the provisions of Law No. 33 of 1964 concerning Funds for Passenger Accident Compulsory Insurance and Law No. 34 of 1964 concerning Traffic Accident Funds. 3) Ideal construction of the position of heirs to the insurance fund (insurance) victims of transportation accidents based on the value of justice. Victims / heirs of Koraban are given the opportunity to take care of other insurance by means of the requirements being legalized or vice versa.

**Keywords:** Reconstruction, Position of Heirs, Value of Justice